

**URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG
MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS NEGARA**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Disusun Oleh :

ADDINI FITRAH AULIYAH
NPM. 20071010077

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

**URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG
MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS NEGARA**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Disusun Oleh :

ADDINI FITRAH AULIYAH
NPM. 20071010077

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG
MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS NEGARA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

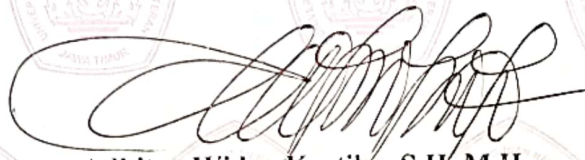
pada hari *Selasa*, tanggal *25 Juni 2024*

Penyusun,

Addini Fitrah Auliyah
NPM. 20071010077

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Adhitva Widya Kartika, S.H, M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui

KOORDINATOR PROGRAM STUDI



Adhitva Widya Kartika, S.H, M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA**

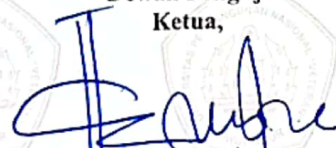
Penyusun,
Addini Fitrah Auliyah
NPM. 20071010077

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hariJumat...., tanggal ...19 Juli 2024...


Pembimbing


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Dewan Penguji
Ketua,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

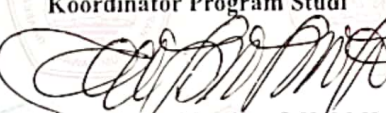
Anggota I,


Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NPT.20 2 19911229 221

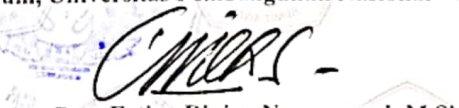
Anggota II,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA**

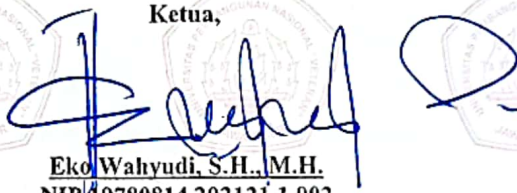
**Penyusun,
Addini Fitrah Auliyah
NPM. 20071010077**

**Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari*Jumat*..., tanggal *19 Juli 2024***


Pembimbing


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


**Dewan Penguji
Ketua,**


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

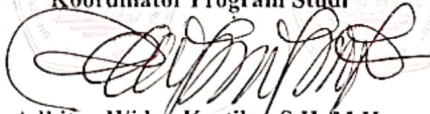
Anggota I,


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NPT.20 2 19911229 221

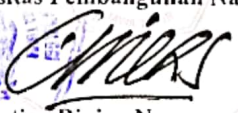
Anggota II,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN OROGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Addini Fitrah Auliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 29 Oktober 2002
NPM : 20071010077
Bidang/Konsentrasi : HAN-HTN
Alamat : Desa Konang, RT 001/RW 001, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 07 Mei 2024

Penyusun,



Addini Fitrah Auliyah

NPM. 20071010077

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat, berkat, dan hidayah yang telah dilimpahkan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA”**.

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai syarat agar Penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyadari bahwa sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Oleh sebab itulah, Penulis berucap terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus selaku

Dosen Pembimbing Skripsi Penulis di Fakultas Hukum UPN “Veteran”
Jawa Timur;

6. Bapak Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh Pendidikan ini;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administratif;
9. Khoirul Hadi selaku ayah Penulis yang selalu memberi doa dan dukungan bagi Penulis;
10. Nur Hayati selaku ibu Penulis yang selalu memberi doa dan dukungan bagi Penulis;
11. Bunga Rizka Sahara selaku adik Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan hiburan bagi Penulis.
12. Imron Setiono selaku *support system*, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan hiburan bagi Penulis.
13. Serta pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu - persatu.

Penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah, Penulis sangat mengharapkan saran dan juga kritik yang positif dan

membangun agar Penulis dapat memperbaiki kesalahan – kesalahan tersebut dikemudian hari. Terakhir, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan syafaat kepada banyak orang yang membacanya. Demikian yang dapat Penulis sampaikan, Penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, April 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Addini Fitrah Auliyah
NPM : 20071010077
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 29 Oktober 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

URGENSI PENGATURAN SAKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA

ABSTRAK

Maraknya kasus politisasi bansos dan BLT pada pelaksanaan kampanye Pemilu tahun 2024 yang merupakan pelanggaran ketentuan pada Pasal 304 UU No. 7 Th 2017 yakni larangan penggunaan fasilitas negara bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu menimbulkan keinginan bagi Penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU No. 7 Th 2017 dan perbedaannya serta untuk mengetahui kekosongan hukum dan aspek *ius constituendum* pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang - undangan. Ketentuan kampanye Pemilu bagi pejabat negara sebelum UU No. 7 Th 2017 terdapat pada UU No. 42 Th 2008 dan pada UU No. 8 Th 2012, perbedaan ketentuan kampanye Pemilu sebelum dengan sesudah UU No. 7 Th 2017 adalah penggabungan pasal, penambahan norma dalam pasal, dan penyelarasan pasal. Kondisi kekosongan hukum dalam UU Pemilu di masa kini adalah tidak adanya pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melanggar larangan Pasal 304 UU No. 7 Th 2017. Aspek *ius constituendum* pengaturan sanksi bagi pejabat negara melanggar Pasal 304 UU No. 7 Th 2017 adalah dengan membentuk pengaturan sanksi baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pelanggar pasal 304 UU No. 7 Th 2017 yang sesuai dengan UU No.12 Th 2011. Hendaknya pengaturan sanksi bagi pejabat negara melanggar Pasal 304 UU No. 7 Th 2017 dirumuskan secara jelas dalam bentuk hukum positif sehingga dapat tercapai kepastian hukum.

Kata Kunci : Urgensi Pengaturan Sanksi, Pejabat negara, Kampanye Pemilu, Fasilitas negara

THE URGENCY OF REGULATING SANCTIONS FOR STATE OFFICIALS WHO CONDUCT ELECTION CAMPAIGNS USING STATE FACILITIES

ABSTRACT

The widespread cases of politicization of social assistance (bansos) and cash transfers (BLT) during the 2024 election campaign, which constitute violations of Article 304 of Law No.7 of 2017, specifically the prohibition on the use of state facilities by state officials for election campaigns, have spurred the Author's interest in conducting this research. This study aims to understand the provisions for state officials in conducting election campaigns before and after Law No. 7 of 2017 and their differences, as well as to identify the legal vacuum and the aspect of ius constituendum in regulating sanctions for state officials who conduct election campaigns using state facilities. The research method employed is normative juridical with conceptual and legislative approaches. The provisions for election campaigns by state officials before Law No. 7 of 2017 are found in Law No. 42 of 2008 and Law No. 8 of 2012. The differences in provisions for election campaigns before and after Law No. 7 of 2017 include the merging of articles, addition of norms within articles, and alignment of articles. The current legal vacuum in the Election Law is the absence of regulations on sanctions for state officials who violate the prohibition in Article 304 of Law No. 7 of 2017. The aspect of ius constituendum in regulating sanctions for state officials who violate Article 304 of Law Law No.7 of 2017 is by establishing sanctions, whether administrative or criminal, for violators of Article 304 of Law No. 7 of 2017, in accordance with Law No. 12 of 2011. Sanctions for state officials who violate Article 304 of Law No. 7 of 2017 should be formulated clearly in positive law form to achieve legal certainty.

Keywords: Urgency of Sanction Regulation, State Officials, Election Campaign, State Facilities

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN OROGINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	8

1.5.2 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	11
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	12
1.5.4 Metode Analisis Data.....	13
1.5.5 Sistematika Penulisan	14
1.5.6 Jadwal Penelitian.....	16
1.5.7 Waktu Penelitian	17
1.6 Kajian Pustaka	18
1.6.1 Tinjauan Umum Sanksi.....	18
1.6.2 Tinjauan Umum Pejabat Negara	19
1.6.3 Tinjauan Umum Fasilitas Negara	22
1.6.4 Tinjauan Umum Kampanye Pemilu.....	24
1.6.5 Teori Negara Hukum.....	25
1.6.6 Teori Kepastian Hukum	27
BAB II KETENTUAN BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU SEBELUM DAN SESUDAH UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU SERTA PERBANDINGANNYA	29
2.1 Ketentuan Bagi Pejabat Negara dalam Melakukan Kampanye Pemilu Sebelum dan Sesudah UU No. 7 Th 2017.....	29
2.2 Perbandingan Ketentuan Bagi Pejabat Negara dalam Melakukan Kampanye Pemilu Sebelum dan Sesudah UU No. 7 Th 2017	53

**BAB III KEKOSONGAN HUKUM DAN ASPEK IUS CONSTITUENDUM
PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG
MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS NEGARA 59**

3.1 Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Bagi Pejabat Negara yang
Melakukan Kampanye Pemilu dengan Menggunakan Fasilitas
Negara..... 59

3.2 Aspek *Ius Constituendum* Pengaturan Sanksi Bagi Pejabat Negara yang
Melakukan Kampanye Pemilu dengan Menggunakan Fasilitas
Negara..... 69

BAB IV PENUTUP 79

4.1 Kesimpulan..... 79

4.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	16
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) UPA Bahasa UPNVJT
- Lampiran 2. Transkrip Sementara
- Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5. Formulir Pengajuan Judul
- Lampiran 6. Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7. Bukti KRS Terbaru
- Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10. Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 11. Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 12. Bukti LOA Jurnal
- Lampiran 13. Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 14. Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 15. Lembar Revisi Penguji 3

DAFTAR SINGKATAN

- UUD NRI Th. 1945 :Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 43 Th 1999 :Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
- UU No. 42 Th 2008 :Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- UU No.12 Th 2011 :Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
- UU No. 15 Th 2011 :Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- UU No. 8 Th 2012 :Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- UU No. 7 Th 2017 :Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- PKPU No. 15 Th :Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- KKPU No. 1621 Th :Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621
2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Bansos	: Bantuan Sosial;
BLT	: Bantuan Langsung Tunai;
Pemilu	: Pemilihan Umum;
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah;
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.